

**jogja**  
istimewa

# EKSPOSE ▶

Hasil Pengendalian Pembangunan Daerah  
Triwulan II TA 2019

Yogyakarta, 25 Juli 2019

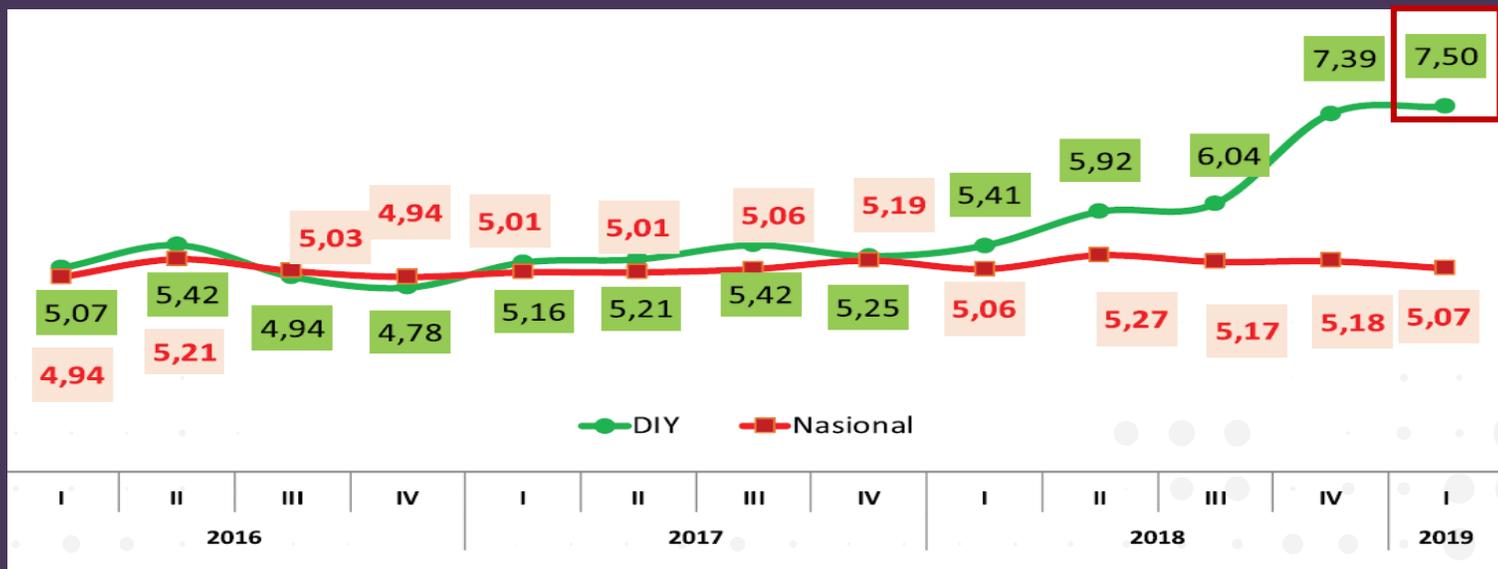


# **KINERJA**

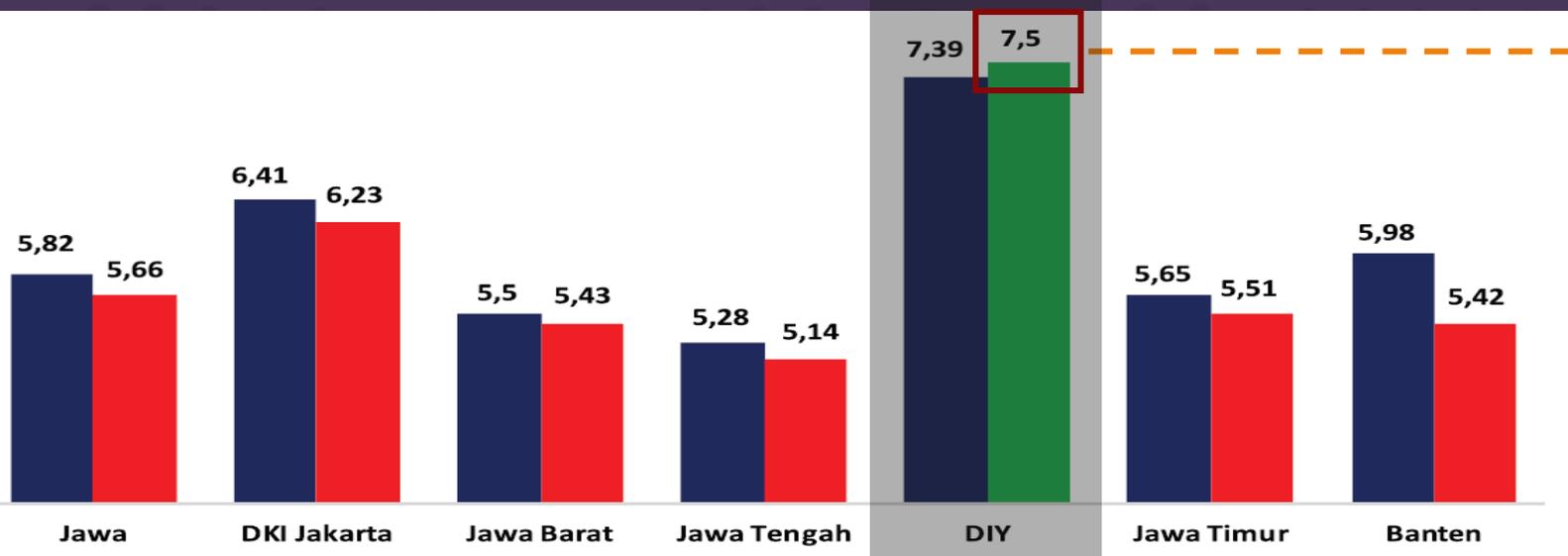
## **Pembangunan Daerah**

# PERTUMBUHAN EKONOMI

Progres pertumbuhan ekonomi DIY dibandingkan Nasional sampai dengan TW 1 tahun 2019 :



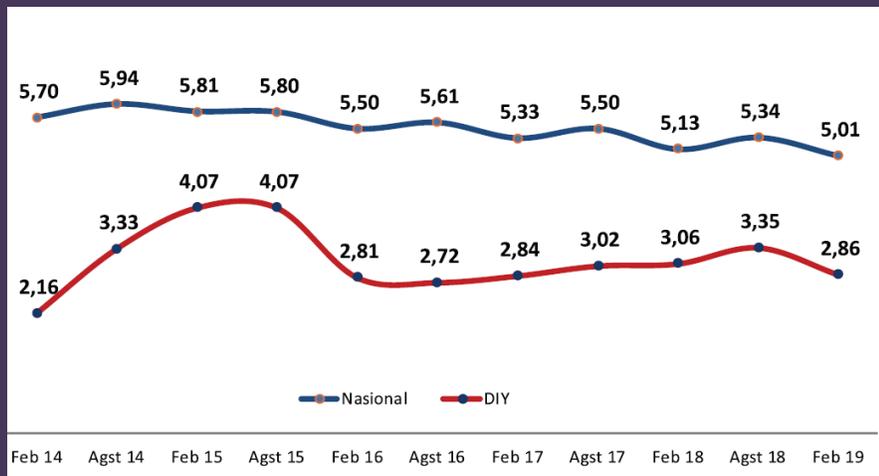
Progres pertumbuhan ekonomi DIY dibandingkan Wilayah Lain di Pulau Jawa pada TW 1 tahun 2019 :



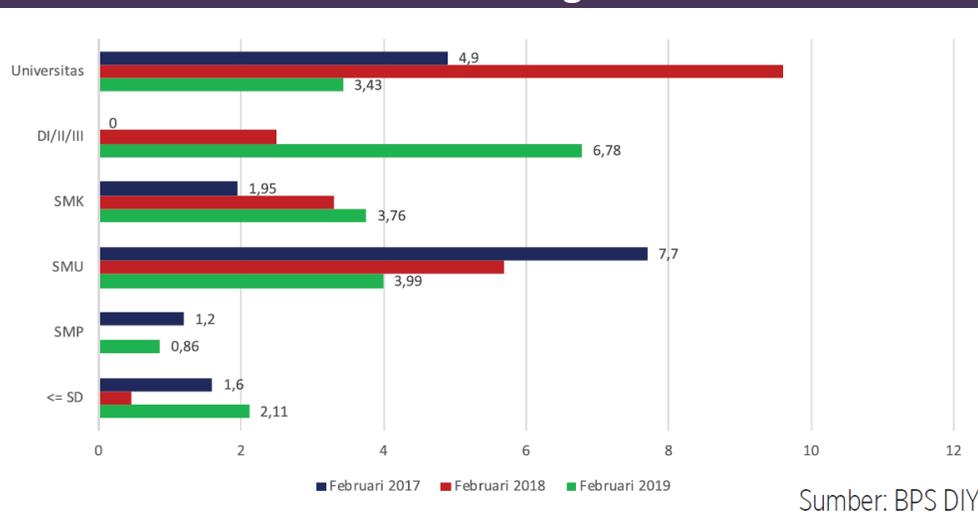
- Kinerja perekonomian DIY pada Triwulan I 2019 tumbuh terakselerasi dengan mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 7,50%
- Angka tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,39% (yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 5,41% (yoy)
- Di samping itu, kinerja perekonomian DIY juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional (5,07%) maupun Jawa (5,66%) secara agregat
- Penyebab pertumbuhan adalah adanya andil pertumbuhan investasi (2,57%) yang masih masif laju pertumbuhannya, dibandingkan konsumsi rumah tangga (1,98%)

# PENGANGGURAN

## Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY dan Nasional Periode 2014-2019 :

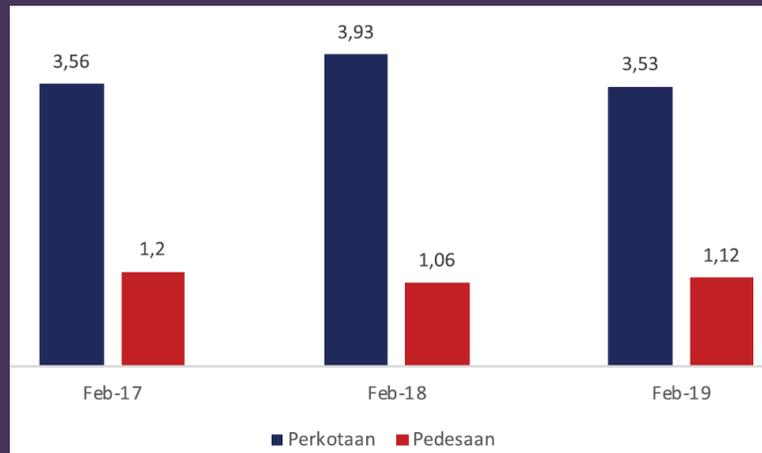


## TPT DIY berdasarkan Tingkat Pendidikan :



Sumber: BPS DIY

## TPT DIY berdasarkan wilayah :



- Pada Feb 2019, **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** di DIY menurun. TPT DIY pada Feb 2019 tercatat 2,86%, lebih rendah dari Feb 2018 sebesar 3,06%. Perlambatan TPT sejalan dengan peningkatan perekonomian DIY pada TW I 2019 yang berdampak pd penyerapan tenaga kerja yang lebih masif. Angka TPT di DIY dimaksud masih dibawah nasional (5,01%) dan masuk dalam 10 besar propinsi dengan TPT terendah.
- Lebih rendahnya pengangguran di pedesaan dikarenakan penduduk pedesaan biasanya tidak terlalu selektif memilih lapangan pekerjaan sehingga akan melakukan kegiatan apa saja walau hanya sebagai pekerja keluarga, pekerja bebas pertanian dan sebagian masih bertahan di pedesaan dengan berusaha mencari pekerjaan dengan cara pulang-pergi ke perkotaan. Hal ini juga semakin didukung dengan kemudahan kepemilikan kendaraan bermotor dan semakin baiknya kondisi infrastruktur, yaitu jalan raya.
- TPT lulusan universitas turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Feb 2019, TPT untuk lulusan universitas tercatat sebesar 3,43%, lebih rendah dibandingkan Feb 2018 yang tercatat sebesar 9,56%. TPT Diploma (DI, II, III) justru meningkat tajam, dari 2,47% menjadi 6,78% pada Feb 2019. Pengangguran terdidik akan berusaha mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah ataupun keahlian yang mereka miliki dengan harapan mau menerima pekerjaan apa saja.

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM DIY dan Nasional 2014-2018 :



- Komponen **pengeluaran per kapita** yang disesuaikan menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 3,15% (yoy). Rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan 2018 mencapai 13,95 juta, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 11,06 juta. Secara level, pengeluaran riil perkapita penduduk DIY tercatat berada di peringkat III tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Tingginya level pengeluaran riil perkapita ini dipengaruhi oleh pola konsumsi penduduk DIY yang lebih bervariasi serta tingkat harga komoditas barang dan jasa yang relatif rendah. Rendahnya harga komoditas barang dan jasa di DIY tercermin dari angka inflasi 2018 sebesar 2,66% (yoy), lebih rendah dibanding rata-rata inflasi DIY 3 tahun sebelumnya (3,20%; yoy). Pencapaian inflasi DIY pada tahun 2018 tersebut juga lebih rendah dibanding Nasional (3,13%; yoy) dan menjadi yang terendah dibanding provinsi lain di Jawa,

- Capaian IPM Kota Yogyakarta ini juga tercatat paling tinggi di Indonesia. Sementara untuk yang paling rendah di Wilayah DIY adalah Kabupaten Gunungkidul. Dimensi yang membuat IPM Kabupaten Gunungkidul lebih rendah dibandingkan daerah lainnya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang hanya tercatat sebesar 7,00%. Artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berusia 25 tahun ke atas hanya mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas 1).

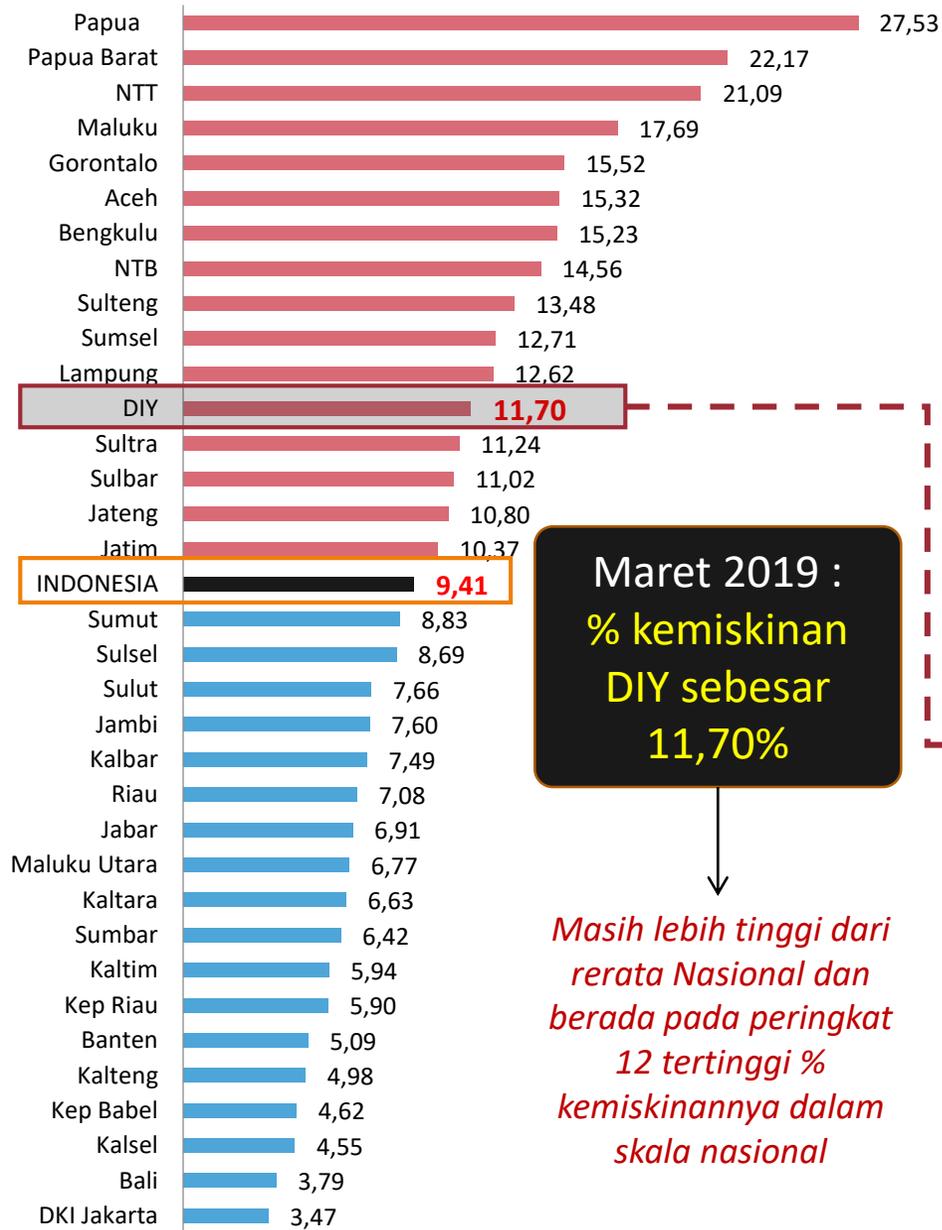
Perkembangan Komponen IPM DIY dan Nasional 2016 - 2018 :

Komponen	Satuan	2016	2017	%	2018	%
				YoY		YoY
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,71	74,74	0,04	74,82	0,11
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,23	15,42	1,25	15,56	0,91
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,12	9,19	0,77	9,32	1,41
Pengeluaran per Kapita	Rp.000	13.229	13.521	2,21	13.946	3,14

Perkembangan Komponen IPM Kab/Kota se-DIY 2017 - 2018 :

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Kulon Progo	75,06	75,12	14,23	14,24	8,64	8,65	9.277	9.698	73,23	73,76
Bantul	73,56	73,66	14,74	15,03	9,2	9,35	14.995	15.386	78,67	79,45
Gunung Kidul	73,82	73,92	12,94	12,95	6,99	7,00	8.788	9.163	68,73	69,24
Sleman	74,63	74,69	16,48	16,71	10,65	10,66	15.365	15.844	82,85	83,42
Yogyakarta	74,35	74,45	16,82	17,05	11,43	11,44	18.005	18.629	85,49	86,11
<b>D.I YOGYAKARTA</b>	<b>74,74</b>	<b>74,82</b>	<b>15,42</b>	<b>16,56</b>	<b>9,19</b>	<b>9,32</b>	<b>13.521</b>	<b>13.946</b>	<b>78,89</b>	<b>79,53</b>

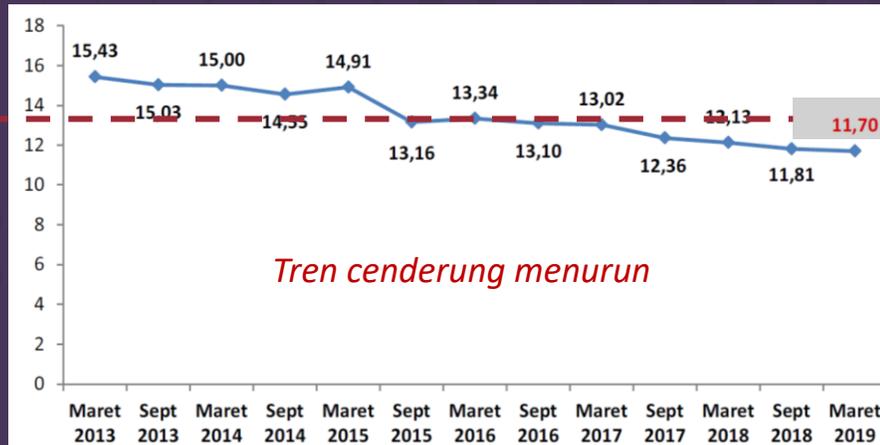
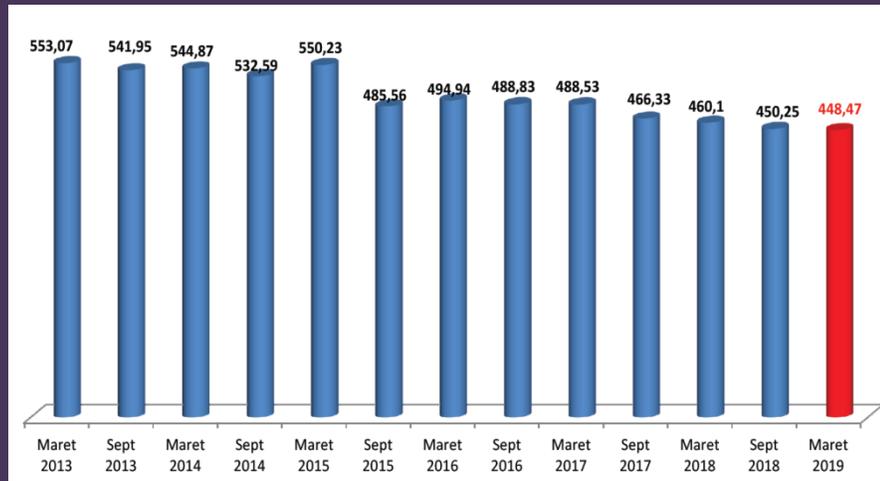
# KEMISKINAN DIY 2019



**Maret 2019 :  
% kemiskinan  
DIY sebesar  
11,70%**

*Masih lebih tinggi dari  
rerata Nasional dan  
berada pada peringkat  
12 tertinggi %  
kemiskinannya dalam  
skala nasional*

## Perkembangan Jumlah & Tingkat Kemiskinan DIY 2013-2018 :

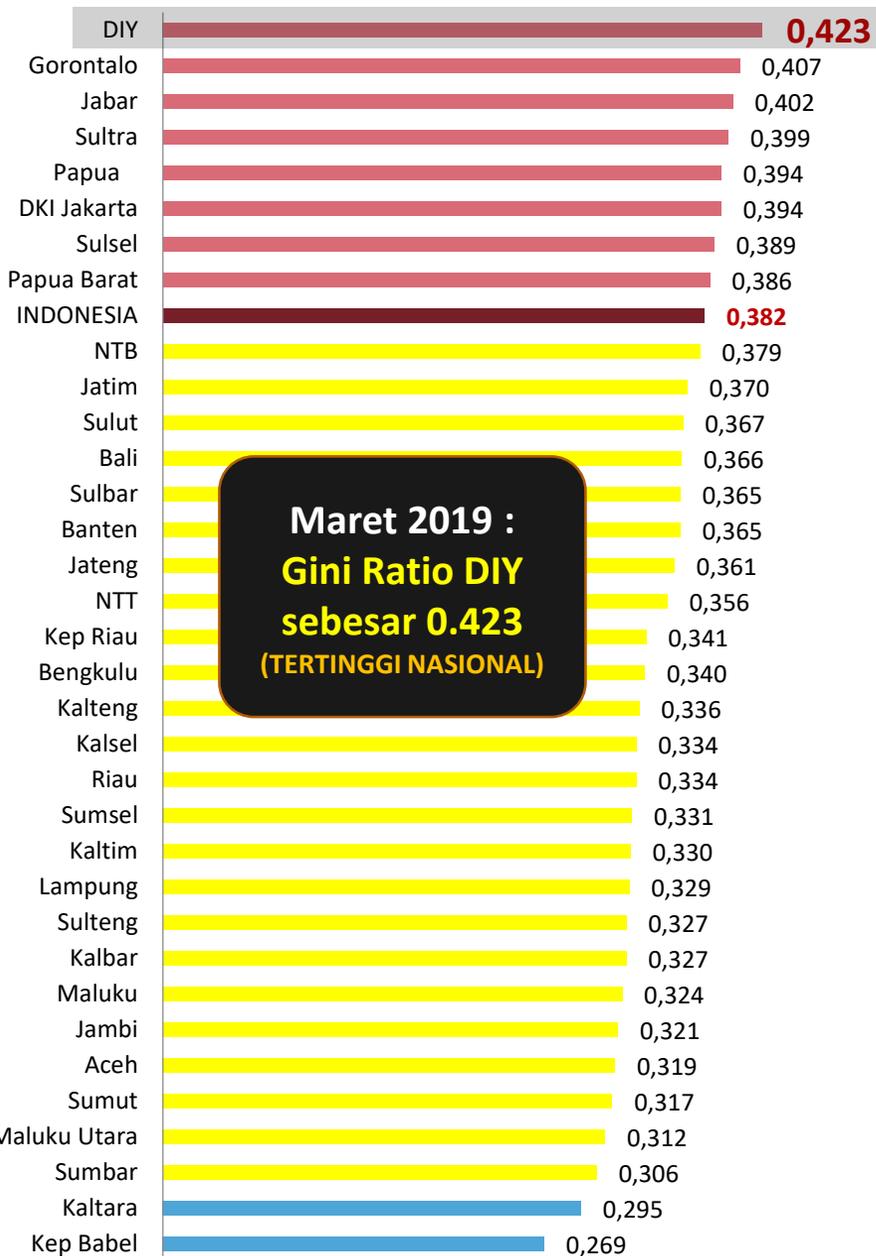


*Tren cenderung menurun*

Sumber : BRS BPS DIY, Juli 2019

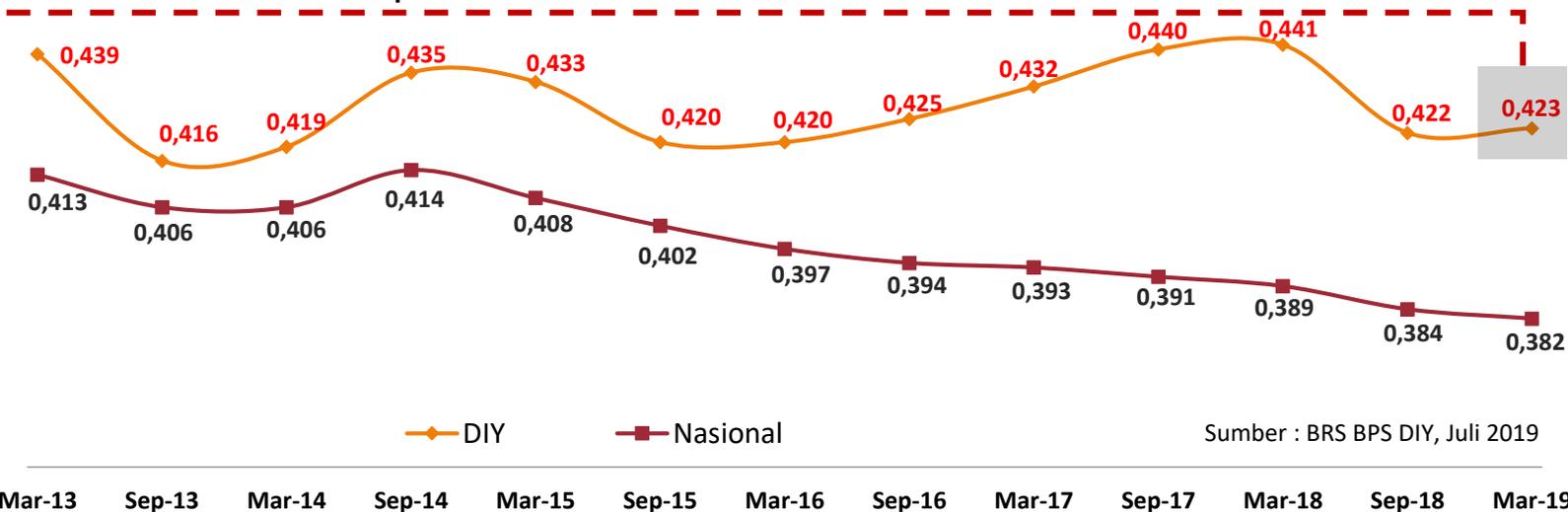
- Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan sampai Maret 2019, memiliki tren menurun.
- Pada Maret 2019, penurunan penduduk miskin DIY sebesar 1,78 ribu orang dibandingkan 6 bulan sebelumnya
- Angka kemiskinan DIY turun sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik, terkendalinya inflasi, & meningkatnya kesejahteraan petani di perdesaan;
- Tingkat kemiskinan di Perdesaan **LEBIH TINGGI** daripada di perkotaan; meskipun secara nominal, jumlah penduduk miskin di perkotaan justru lebih tinggi daripada di perdesaan. Meski demikian, tingkat kemiskinan di perdesaan dan perkotaan, semuanya memiliki tren menurun (Maret, 2019)

# KETIMPANGAN PENDAPATAN / GINI RATIO DIY 2019



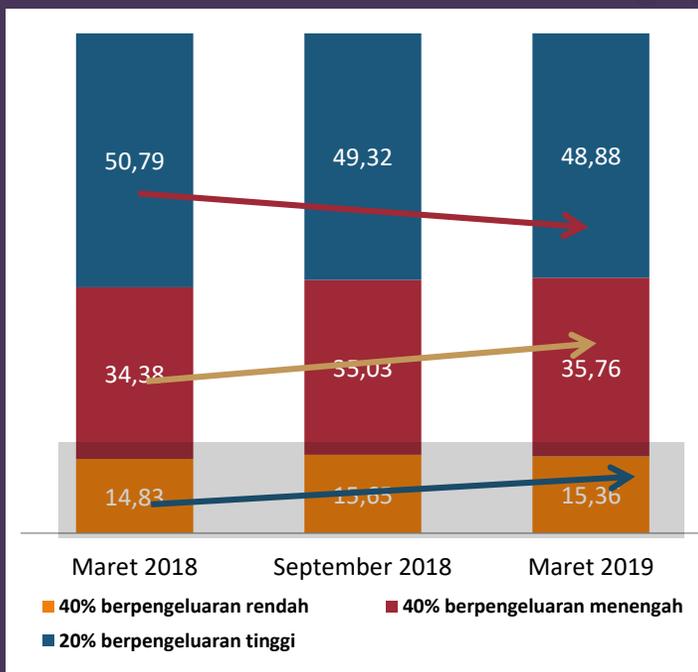
**Maret 2019 :  
Gini Ratio DIY  
sebesar 0.423  
(TERTINGGI NASIONAL)**

Ginie Ratio DIY dan Nasional pada 2013 – 2019 :



Sumber : BRS BPS DIY, Juli 2019

Distribusi Pengeluaran Penduduk di DIY 2018-2019



- Pada Maret 2019, capaian gini ratio DIY masih yang tertinggi nasional (terburuk). Apabila tren nasional cenderung turun, maka sebaliknya gini ratio DIY cenderung stagnan/meningkat
- Capaian gini ratio DIY pada Maret 2019, meningkat 0,001 poin dibandingkan September 2018
- Problem gini ratio di DIY disumbang dari tingginya angka gini ratio perkotaan (0,424) dibandingkan gini ratio di perdesaan (0,328)
- 40% penduduk kelompok berpengeluaran terendah melakukan konsumsi sebanyak 15,36 % (pd maret 2019) dari total konsumsi yang dilakukan oleh seluruh penduduk DIY. Trennya cenderung meningkat.



# **KINERJA**

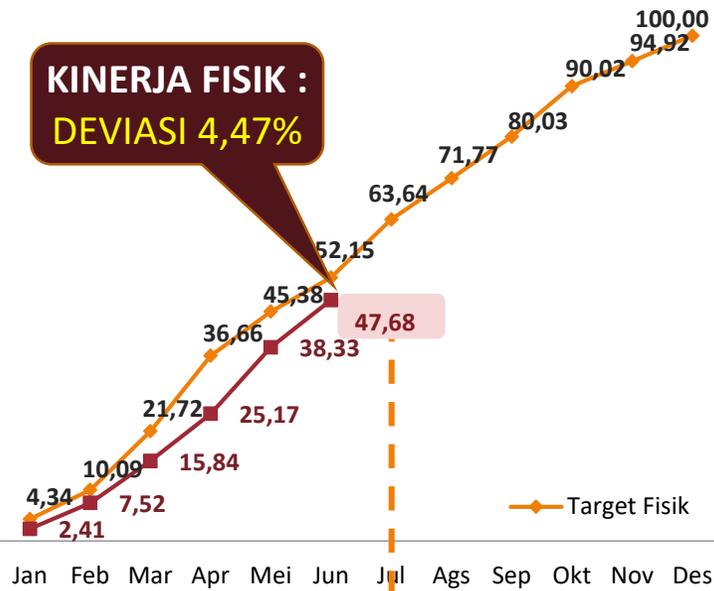
## **APBD Triwulan I**

### **Tahun 2019**

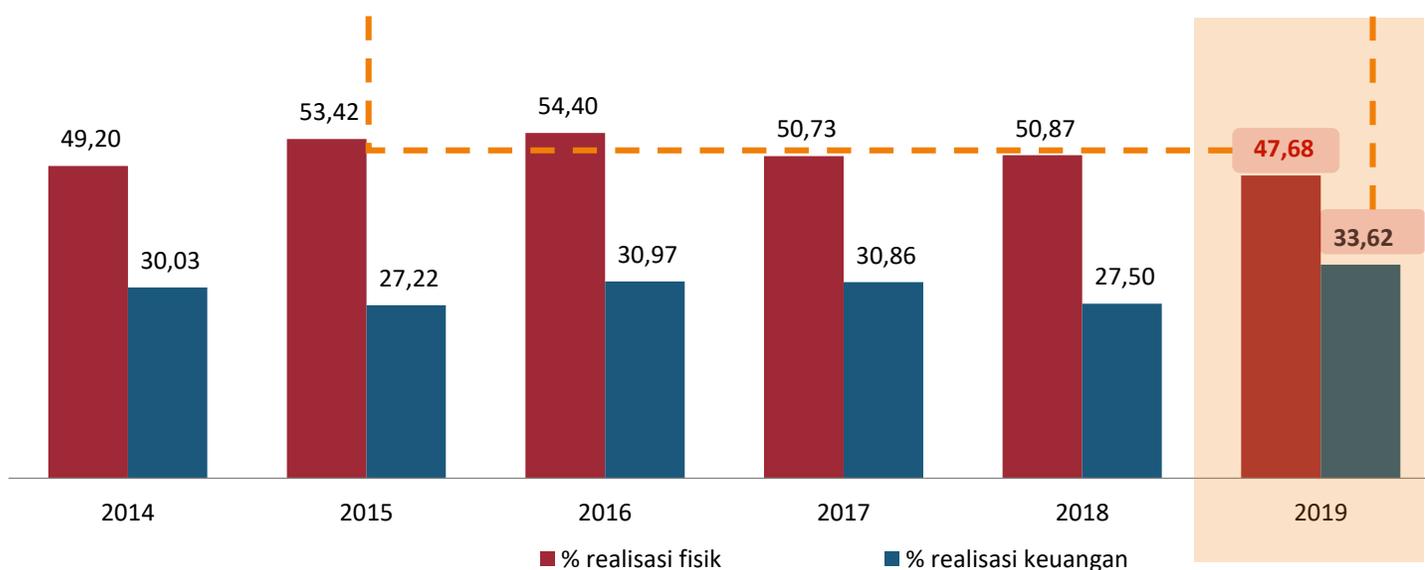
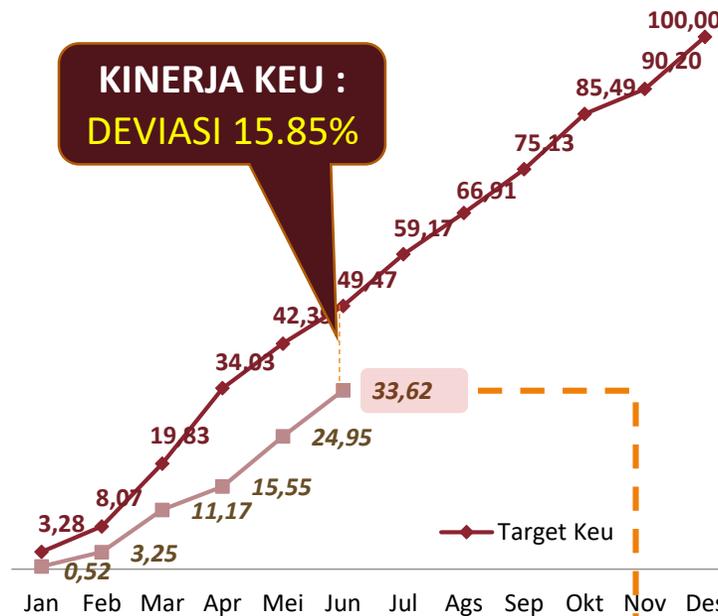
# KINERJA FISIK & KEUANGAN BELANJA LANGSUNG S.D. TW II TAHUN 2019

## POTRET KINERJA FISIK HINGGA JUNI 2019 :

**KINERJA FISIK :**  
**DEVIASI 4,47%**



**KINERJA KEU :**  
**DEVIASI 15.85%**

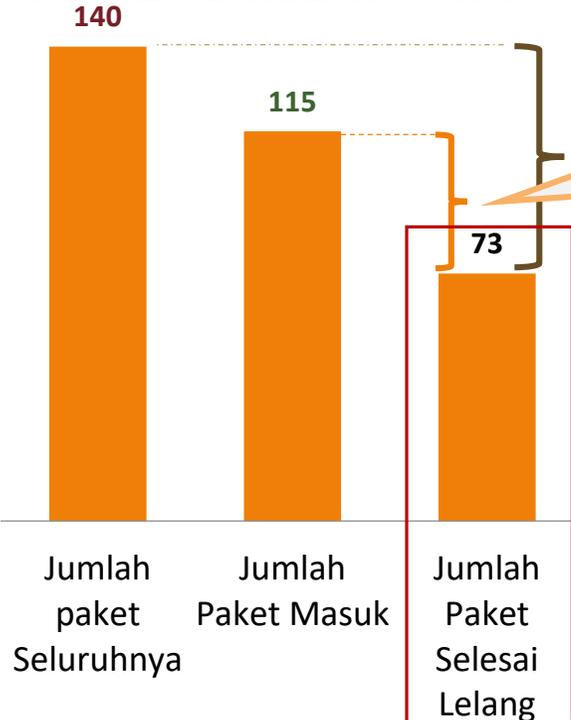


- Hingga TW II Tahun 2019, progres kinerja fisik sudah mencapai 47,68% dan progres kinerja keuangan mencapai 33,62%.
- Adapun deviasi kinerja fisik mencapai <5%, sedangkan deviasi kinerja keuangan mencapai 15,85% (>10%)
- Selama enam tahun terakhir, progres kinerja fisik pada TW II 2019 cenderung mengalami pelambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan adanya banyaknya Pembangunan Konstruksi (paket lelang konstruksi) yang terlambat. Sebagian besar masih dalam proses lelang di BLP hingga TW II 2019.
- Selain itu, faktor signifikan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, diantaranya adalah keterlambatan pelaksanaan kegiatan BOS pada Disdikpora, dan mundurnya pelaksanaan kegiatan pada sejumlah OPD

# PROGRES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) HINGGA TW II TAHUN 2019

No	Jenis Pengadaan	Jumlah paket Seluruhnya	Jumlah Paket Masuk	Jumlah Paket Selesai Lelang	Jumlah Pagu Paket Seluruhnya	Jumlah Pagu Paket Masuk	Jumlah Pagu Paket Selesai Lelang
1	Barang	163	131	90	179.010.723.092	150.601.807.309	109.993.605.830
2	Jasa Lainnya	146	132	121	87.330.522.997	75.250.638.743	69.769.707.743
3	Jasa Konsultansi	163	137	93	55.499.890.301	43.910.813.301	31.447.337.700
4	<b>KONSTRUKSI</b>	<b>140</b>	<b>115</b>	<b>73</b>	<b>471.148.009.523</b>	<b>451.553.391.125</b>	<b>318.414.169.828</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>612</b>	<b>515</b>	<b>380</b>	<b>792.989.145.913</b>	<b>721.316.650.478</b>	<b>529.624.821.101</b>

## PROGRES PBJ PAKET KONSTRUKSI :



% paket konstruksi selesai lelang thd total paket konstruksi : 52 %

% paket konstruksi selesai lelang thd jumlah paket konstruksi masuk : 63 %

- Hingga TW II 2019, sebanyak 380 paket dinyatakan selesai lelang dari total 612 paket. Artinya, sebanyak 62 % paket sudah selesai lelang dengan nilai Rp setara dengan 67 % dari nilai total PBJ
- **Paket konstruksi memiliki nilai strategis, meskipun jumlah paketnya tidak besar; tetapi nilai paketnya mencapai 59 % dari total nilai Rp PBJ. Namun, progres paket konstruksi hanya mencapai 52 % dari total paket atau setara dengan 67 % dari nilai uang total paket konstruksi.**

- Adapun penjelasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang memiliki ketimpangan dalam pelaksanaan PBJ, terutama paket pekerjaan konstruksi adalah :

1. Hampir semua paket tender konstruksi yang berasal dari kegiatan DAK Fisik pada sejumlah OPD (Dispar, Dikpora, DLHK, PUP ESDM, Distan), masih pada tahap tender. Diharapkan pada Juli 2019, semua kontrak bisa ditandatangani (sekurangnya terdapat 25 paket tender konstruksi)
2. Dinas PUP ESDM → setidaknya 10 paket konstruksi masih belum kontrak hingga TW II
3. Dinas Pariwisata → sekurangnya 5 paket konstruksi juga dalam proses tender PBJ di BLP
4. Dinas LHK → sekurangnya 6 paket konstruksi masih jalan ditempat, berkaitan dengan permasalahan izin pemanfaatan tanah kas desa untuk telaga desa / wana desa

# CATATAN KHUSUS

- Adanya keterlambatan kegiatan, terutama pada pelaksanaan BOS pada sejumlah SMA / SMK dengan deviasi yang cukup besar (baik fisik maupun keuangan), karena dinamika kendali yang cukup luas/beragam (keterlambatan SPj, *keterlambatan/rescheduling* kegiatan, regulasi dari Pusat), mengakibatkan kinerja menjadi tidak optimal.
- Untuk progres pelaksanaan kegiatan DAK, yang tersebar pada 9 OPD (Dikpora, Dinkes (Grhasia & Bapelkes), Dinas PUP ESDM, Distan KP, Dislautkan, DLHK, Dispar, Diskop, Biro Tapem) mendapat perhatian khusus, mengingat pengelolaan kegiatan (termasuk penganggarannya) memiliki tatacara yang memerlukan perhatian secara bertahap sesuai aturan .
- Perlunya percepatan pelaksanaan tender konstruksi pada sisa waktu periode yang tersisa dengan mempertimbangkan target waktu pada TW III dan TW IV.
- Terhadap pembangunan konstruksi yang memanfaatkan tanah desa (tanah kas desa), diharapkan memperhatikan tata cara pemanfaatan tanah desa/kas desa sesuai regulasi dan mempertimbangkan tatakala waktu yang ada, sehingga paket pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan pada lokasi tersebut bisa segera diproses lebih lanjut. Belajar dari tersendatnya pembangunan telaga desa ( 4 buah telaga desa) dan pembagian bibit/pupuk untuk wanadesa pada Dinas LH dan Kehutanan pada tahun 2019 ini.
- Adanya lelang ulang hingga 4 kali (hingga saat ini), terhadap paket pengadaan *boiler* (senilai Rp 850 juta) untuk suling minyak kayu putih pada tahun 2019, dapat berdampak pada proses produksi pabrik minyak kayu putih pada tahun 2019 (di Balai KPH Yogyakarta), yang dapat berpengaruh pada dinamika pendapatan dari penjualan minyak kayu putih.



# FOKUS PEMBERDAYAAN WILAYAH MISKIN SECARA TERPADU PADA 2019

(Studi Kasus pada Wilayah Imogiri-Dlingo, Bantul) → sebagai salah satu Wilayah MISKIN di DIY

Bantuan peralatan usaha meubel pada 2 kelompok meubel di Dlingo senilai Rp 50 juta (Diskop UKM DIY)

Pembangunan akses dan sarpras pengembangan pariwisata di Wilayah Mangunan (Watu Mabur, Bukit Panguk, lintang Sewu, Puncak Becici, Seribu batu, Dahromo, Pinus Asri) senilai Rp 7,8 M (Dispar DIY)

Penguatan kelembagaan Desa PRIMA senilai Rp 555 juta & penguatan ekonomi desa melalui Desa Prima Mandiri Budaya senilai Rp 184 juta (DP3AP2 DIY)

Peningkatan ruas jalan Imogiri-Mangunan senilai Rp 14,9 M & Peningkatan ruas jalan Yogyakarta-Imogiri senilai Rp 11,9 M (Dinas PUP ESDM DIY)

Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Imogiri senilai Rp 5,6 M (Dinas PUP ESDM DIY)

Bantuan pemasangan instalasi listrik pada 301 KK di Imogiri senilai Rp 625 juta (Dinas PUP ESDM DIY)

Pengemb Lumbung Mataraman pada 1 kelompok di Dlingo senilai Rp 25 juta, Bantuan ternak kambing senilai Rp 360 juta pada 4 kel di Dlingo, bantuan sarpras tanaman pangan utk 10 Kel di Dlingo-Imogiri senilai Rp 98 juta, bantuan cadangan pangan utk 1 kel di Imogiri senilai Rp 15 juta (Distan & KP DIY)

Pemberian hibah untuk pembentukan kesempatan kerja pada 2 kelompok di Imogiri senilai Rp 40 juta, bantuan untuk perlindungan pekerja pengolahan makanan pada 2 kelompok di Imogiri senilai Rp 61 juta (Disnakertrans DIY)

Pemberian hibah bantuan peralatan usaha ekonomi produktif pada 7 kelompok senilai Rp 330 juta (Disperindag DIY)

Pembangunan IPAL Komunal Kampung Batik Giriloyo, Imogiri senilai Rp 776 juta (Disperindag DIY)

Pembangunan Telaga Desa Pokoh, Dlingo senilai Rp 1,35 M (Dinas LHK DIY)

Pembangunan Irigasi tanah Dangkal (DAK Fisik) di Selopamiro, Imogiri senilai Rp 187 juta (Distan Bantul)

Pembangunan jringan perpipaan SPAM, sambungan rumah Pamsimas Desa Selopamiroro Imogiri dan Desa Jatimulyo, Dlingo (DAK Fisik) senilai Rp 1 M (Dinas PU Bantul)

Peningkatan jalan Banjarharjo-Pucung, Wukirsari-Imogiri senilai Rp 4,9 M (DAK Fisik) pada Dinas PU Bantul

Penguatan kelembagaan Desa PRIMA senilai Rp 37 juta pada DP3AP2 DIY

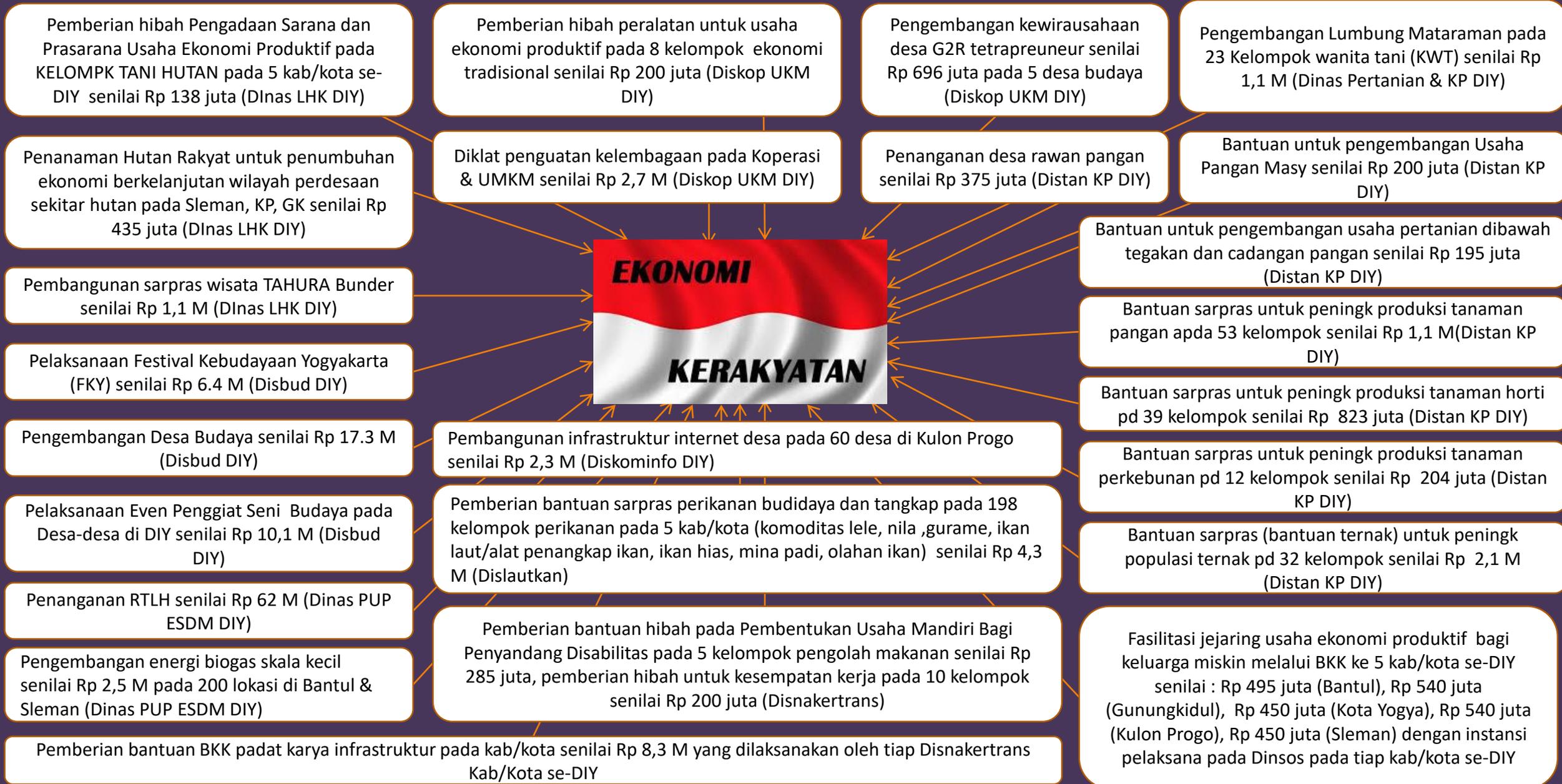
Pemberian bantuan bibit lele dan gurami untuk 5 kelompok senilai Rp 97 juta di Imogiri (Dislautkan)

Pemberian bantuan jejaring usaha ekonomi produktif bagi KK miskin pada Imogiri/Dlingo dari BKK (Dinsos P3A Bantul)



**SEKURANGNYA TERDAPAT 14 OPD YANG TERLIBAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI WILAYAH DLINGO-MANGUNAN**

# SKEMA PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN PADA 2019





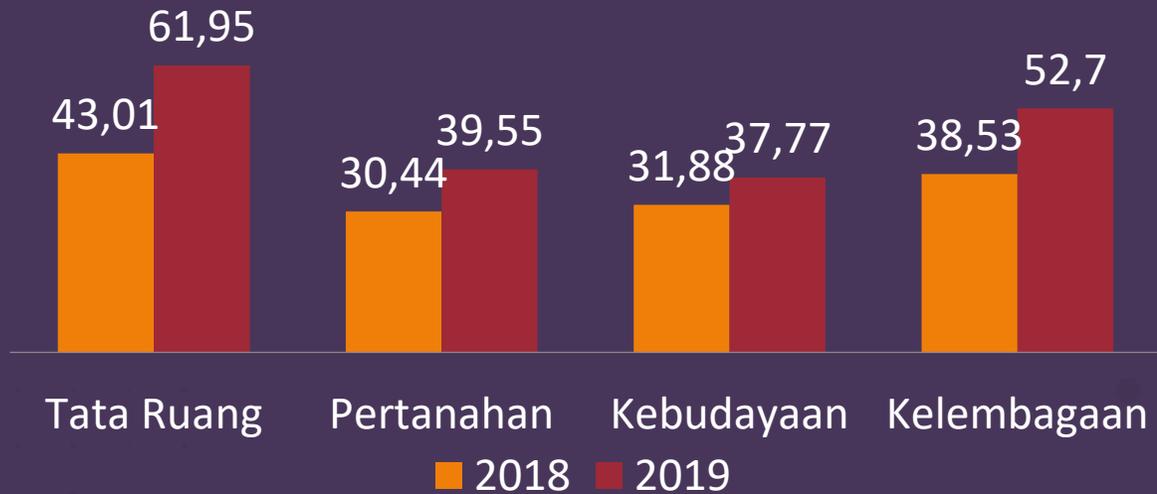
# **KINERJA**

## **Pelaksanaan**

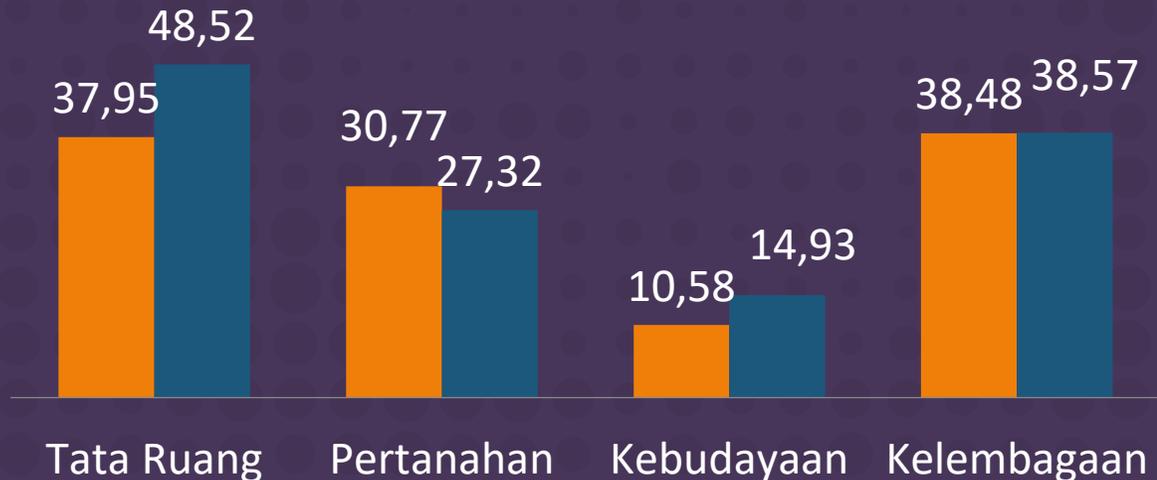
### **Anggaran Keistimewaan**

# KINERJA PER URUSAN SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2019

## Kinerja Fisik s.d. TW II 2018 & TW II 2019 :



## Kinerja Keuangan s.d. TW II 2018 & TW II 2019 :



- Secara umum, kinerja pelaksanaan danais pada TW II Tahun 2019 lebih baik dibandingkan TW yang sama pada tahun sebelumnya, baik dari aspek fisik maupun keuangannya
- Kinerja fisik tertinggi ada pada pelaksanaan urusan TATARUANG (fisik 61,95% dan keu 48,52%) sedangkan **kinerja fisik/keuangan terendah, berada pada pelaksanaan kegiatan Urusan KEBUDAYAAN (fisik 37,77% dan keu 14,93%)**

## DEVIASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN S.D. TW II TAHUN 2019 :

Urusan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keu (%)	Deviasi (%)
Tata Ruang	61.95	48.52	13.43
Kelembagaan	52.7	38.57	14.13
Pertanahan	39.55	27.32	12.23
Kebudayaan	37.77	14.93	22.84

- Pembebasan lahan utk revitalisasi eks jokteng kulon-utara dilakukan pd tahap III (URUSAN KEBUDAYAAN)
- Status lahan yang belum clear, berdampak apda tersendatnya pelaksanaan kegiatan
- Penataan Lansekap Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra, luas 1.895 m<sup>2</sup> (terhenti karena permasalahan kasasi dari MA)
- Pengelolaan dan Pemeliharaan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra (luas 6.801 m<sup>2</sup>) tidak optimal dikarenakan belum ada kesepakatan Relokasi PKL oleh Pemerintah Kota.

# PROGRES PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN PADA KABUPATEN/KOTA

## PROGRES PELAKSANAAN PADA PENGGUNA ANGGARAN (PA) DANAIS 2019 (KULON PROGO & GUNUNGKIDUL) s.d. TW II 2019 :

PA Danais 2019	Kelembagaan		Pertanahan		Tata Ruang		Kebudayaan	
	% fisik	% keu	% fisik	% keu	% fisik	% keu	% fisik	% keu
KULON PROGO	41.20	20.05	31.01	14.25	14.00	1.79	41.30	12.22
GUNUNGKIDUL	37.56	36.88	27.78	21.04	58.50	0.47	22.26	3.61

- Secara umum, kinerja keuangan memiliki gap yang cukup lebar (> 10%) dibandingkan kinerja fisiknya
- Kinerja pelaksanaan yang cukup rendah, adalah pelaksanaan Urusan KEBUDAYAAN & TATARUANG, pada Kab. Kulon Progo maupun Kab. Gunungkidul
- **Perlu akselerasi pelaksanaan danais pada Kab Kulon Progo dan Gunungkidul (sebagai PA)**

## PROGRES PELAKSANAAN PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DANAIS 2019 (KOTA JOGJA, BANTUL, & SLEMAN) :

KPA Danais 2019	Kelembagaan		Pertanahan		Tata Ruang		Kebudayaan	
	% fisik	% keu	% fisik	% keu	% fisik	% keu	% fisik	% keu
KOTA YOGYA	53.08	38.93	79.00	39.75	5.06	2.00	38.20	7.46
BANTUL	62.86	47.37	-	-	3.36	0.04	30.15	25.70
SLEMAN	40.18	37.83	28.00	26.58	67.07	3.46	32.70	36.27

- Secara umum, kinerja keuangan memiliki gap yang cukup lebar (> 10%) dibandingkan kinerja fisiknya
- Kinerja pelaksanaan yang cukup rendah, adalah pelaksanaan Urusan Tata ruang, pada KOTA YOGYA dan BANTUL, serta SLEMAN (kinerja keuangannya sangat rendah)

## CATATAN PELAKSANAAN PADA PA/KPA KAB/KOTA :

- Pembangunan Taman Budaya GK, rehab Bangsal Sewokoprojo, & Situs Sokoliman masih pada tahap tender → penyebab deviasi keuangan pd Urusan Kebudayaan di PEMKAB GK
- Penataan sirip-sirip Malioboro dan revitalisasi PKL Malioboro adalah problem yang harus dituntaskan pada tahun ini → Pengelolaan dais urusan tataruang di PEMKOT YOGYA

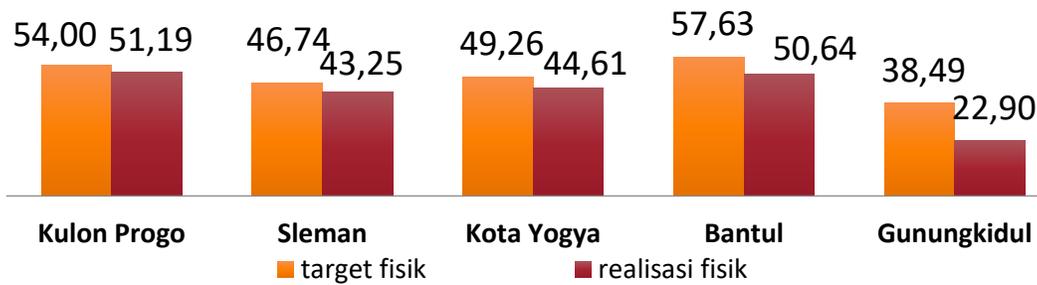


# **KINERJA**

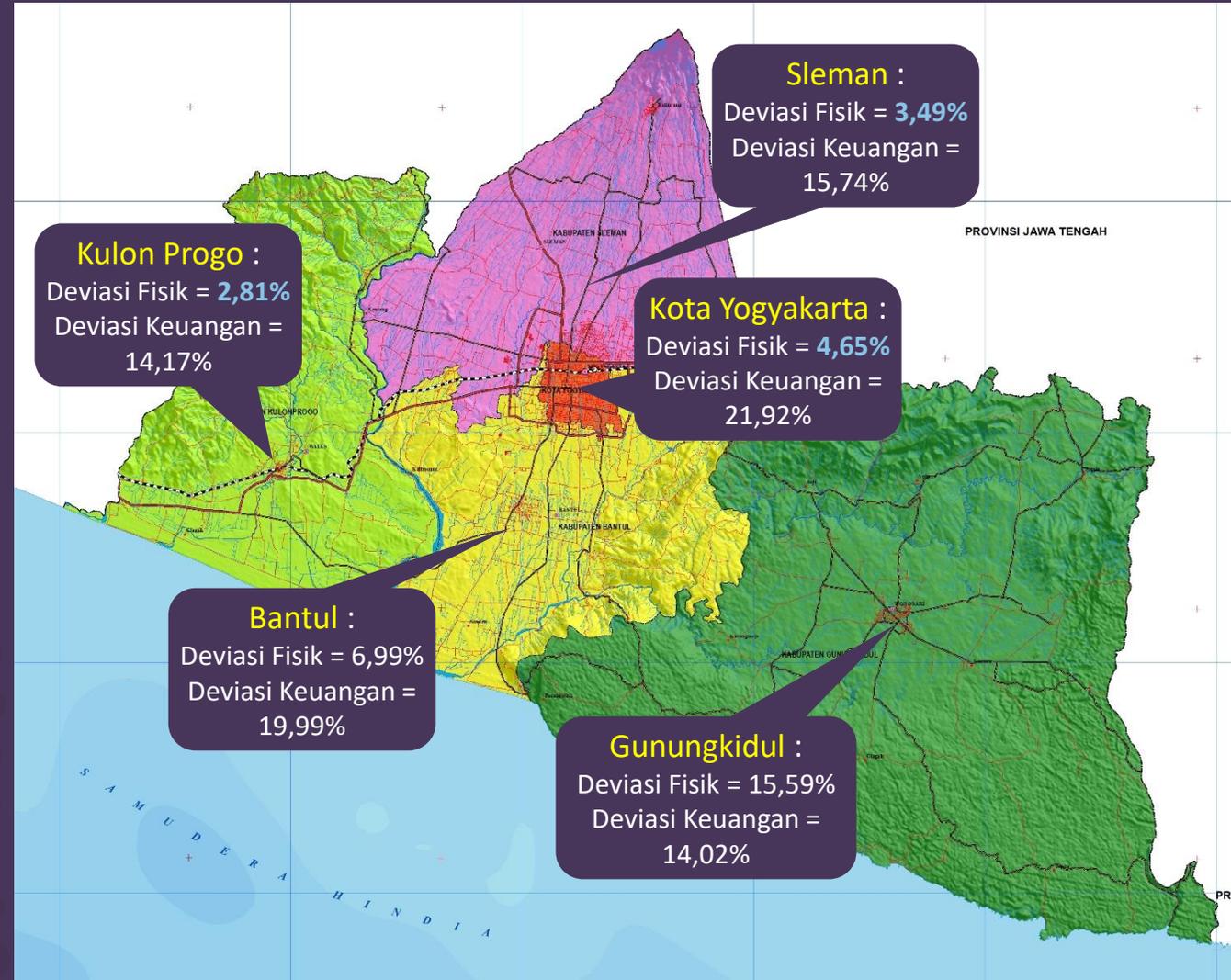
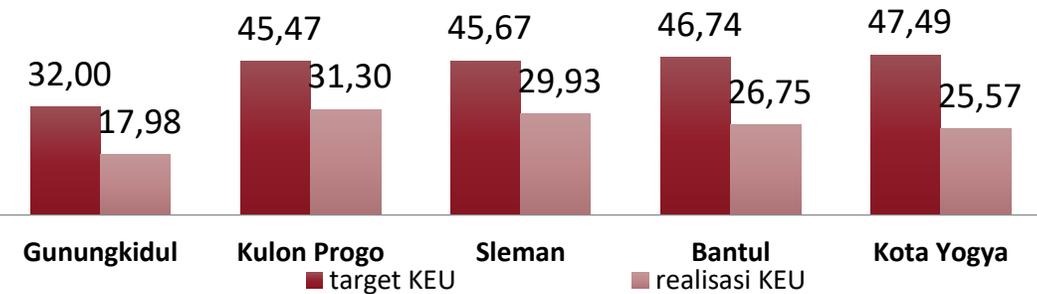
## **Kabupaten/Kota**

# CAPAIAN FISIK & KEUANGAN APBD KABUPATEN/KOTA TW II 2019

## Kinerja FISIK Kab/Kota s.d. TW II Tahun 2019 :



## Kinerja KEUANGAN Kab/Kota s.d. TW II Tahun 2019 :



- Progres kinerja fisik tertinggi dengan deviasi kinerja fisik terendah pada TW II 2019, berada pada PEMKAB KULON PROGO
- Kinerja keuangan tertinggi, ada pada PEMKOT YOGYAKARTA; sedangkan Deviasi Keuangan Terendah, berada pada PEMKAB GUNUNGKIDUL
- Hampir semua PEMKAB/PEMKOT mengalami keterlambatan pelaksanaan kegiatan (terutama belanja modal) yang disebabkan banyaknya lelang konstruksi yang terlambat, karena: regulasi Permen PU 7/2019 dan penjadwalan ulang kegiatan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius agar kegiatan bisa optimal hingga akhir tahun

# CATATAN TERHADAP PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA

- Semua Kab/kota mengalami **perlambatan** pelaksanaan pekerjaan (berdampak pada rendahnya serapan BELANJA MODAL), terutama pembangunan konstruksi, hingga TW II 2019. Hal ini perlu dicermati, terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang hingga memasuki TW III, terutama tender yang masih berlangsung pada Badan Layanan Pengadaan, adalah munculnya paket pekerjaan yang berpotensi KRITIS, karena penyelesaiannya hampir sebagian besar berada pada akhir tahun 2019.

Kabupaten/Kota	Belanja Modal Target TW II 2019	Belanja Modal Realisasi TW II 2019	Deviasi	PENJELASAN PROGRES TENDER/PBJ hingga TW II 2019
BANTUL	37.52%	8.67%	<b>28.85%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>75 % PBJ (247 paket) masih dalam proses atau belum kontrak sama sekali</li><li>Lelang konstruksi mundur dari jadwal berkaitan menunggu diterbitkannya Permen PU 7/2019</li></ul>
GUNUNGKIDUL	23.79%	4.72%	<b>19.07%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>79 % PBJ (111 paket) masih dalam proses atau belum kontrak sama sekali</li><li>Lelang konstruksi mundur dari jadwal berkaitan menunggu diterbitkannya Permen PU 7/2019</li></ul>
KOTA YOGYA	36.51%	8.39%	<b>28.12%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>59 % PBJ (94 paket) masih dalam proses atau belum kontrak sama sekali</li><li>Lelang konstruksi mundur dari jadwal berkaitan menunggu diterbitkannya Permen PU 7/2019</li></ul>
KULON PROGO	41.32%	21.15%	<b>20.17%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>41 % PBJ (69 paket) masih dalam proses atau belum kontrak sama sekali</li></ul>
SLEMAN	39.38%	12.27%	<b>27.11%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>41 % PBJ (111 paket) masih dalam proses atau belum kontrak sama sekali</li><li>Masih ada 39 paket yang gagal lelang/lelang ulang, hingga penjadwalan kegiatan harus direchedule</li></ul>

→ **Serapan RENDAH, Deviasi BESAR !!!**

- Mohon dukungan kepada semua PEMKAB/PEMKOT untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan. Mencermati, pada Maret 2019, tingkat kemiskinan di DIY hanya turun 0,1 poin dibandingkan 6 bulan sebelumnya. Untuk itu, optimalisasi BKK Pemda DIY kepada Pemkab/Pemkot (modal usaha ekonomi produktif utk PKH, jambanisasi, padat karya infrastruktur) dan optimalisasi kegiatan baik yang dibiayai APBD maupun swasta (CSR, fillantropi) perlu DIKAWAL dan DITUMBUHKEMBANGKAN secara KREATIF

# **KINERJA**

## **Pelaksanaan Kegiatan OPD Triwulan II TA 2019**

# PENILAIAN KINERJA KEGIATAN INSTANSI (PKKI)

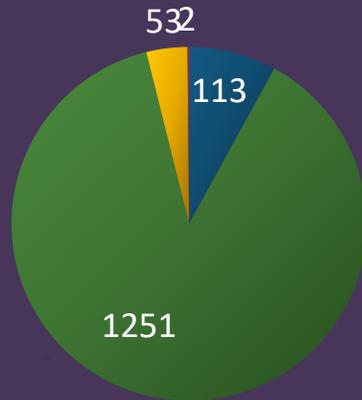
Berbasis Pada Empat Pilar BSC → Konsep PKKI Tahun 2019



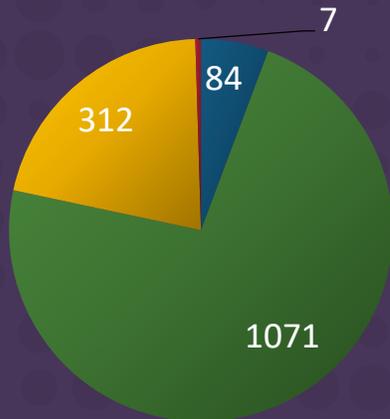
# KINERJA KEGIATAN

## SKEMA PENILAIAN BARU (BSC YANG DISESUAIKAN)

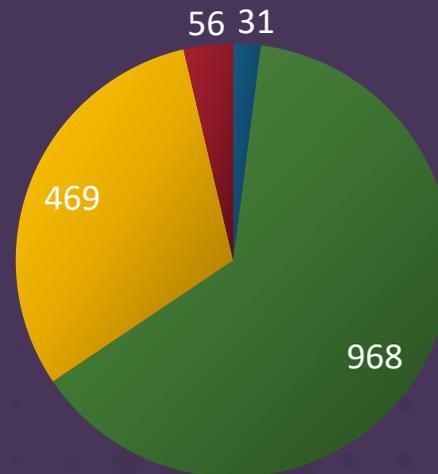
### Kinerja Kegiatan TW II 2017



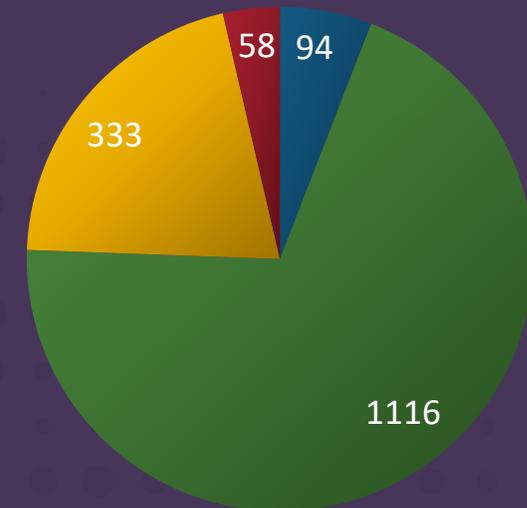
### Kinerja Kegiatan TW II 2018



### Kinerja Kegiatan TW I 2019



### Kinerja Kegiatan TW II 2019



■ sangat baik  
■ baik  
■ cukup  
■ kurang

- Kinerja pelaksanaan kegiatan pada TW II 2019 mengalami perbaikan dibandingkan TW I 2019
- Namun apabila dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada triwulan yang sama, maka kinerja TW II 2019, justru terkesan menurun (masih ada kegiatan yang bernilai kurang dan kategori cukup masih cukup dominan)

# KINERJA PKKI 2018-2019

- Kinerja PKKI pada TW II 2019, sudah lebih baik dibandingkan TW I 2019; tetapi masih jauh dibawah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya



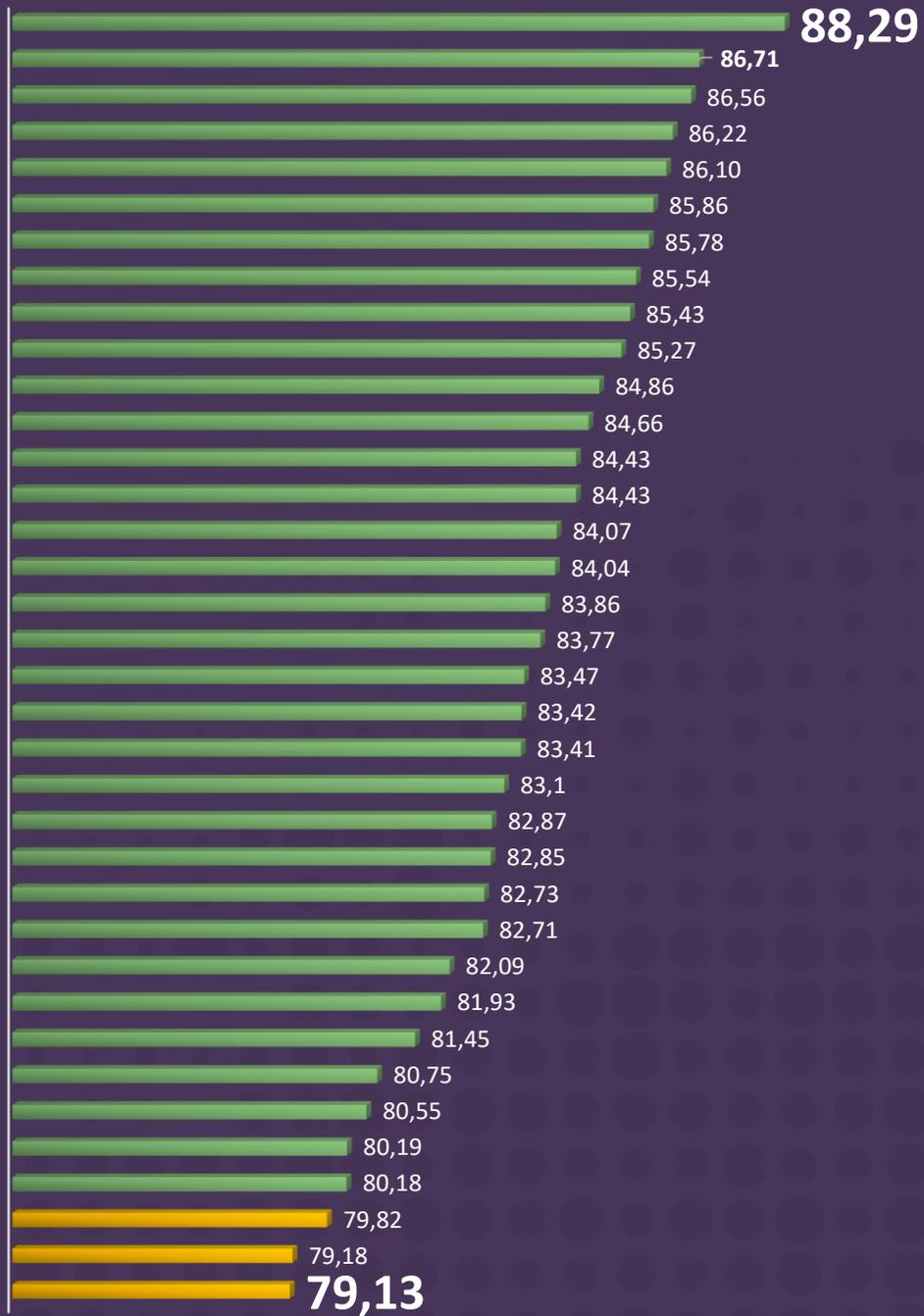




# Nilai Akhir PKKI

## Kegiatan OPD Triwulan 2 Tahun 2019

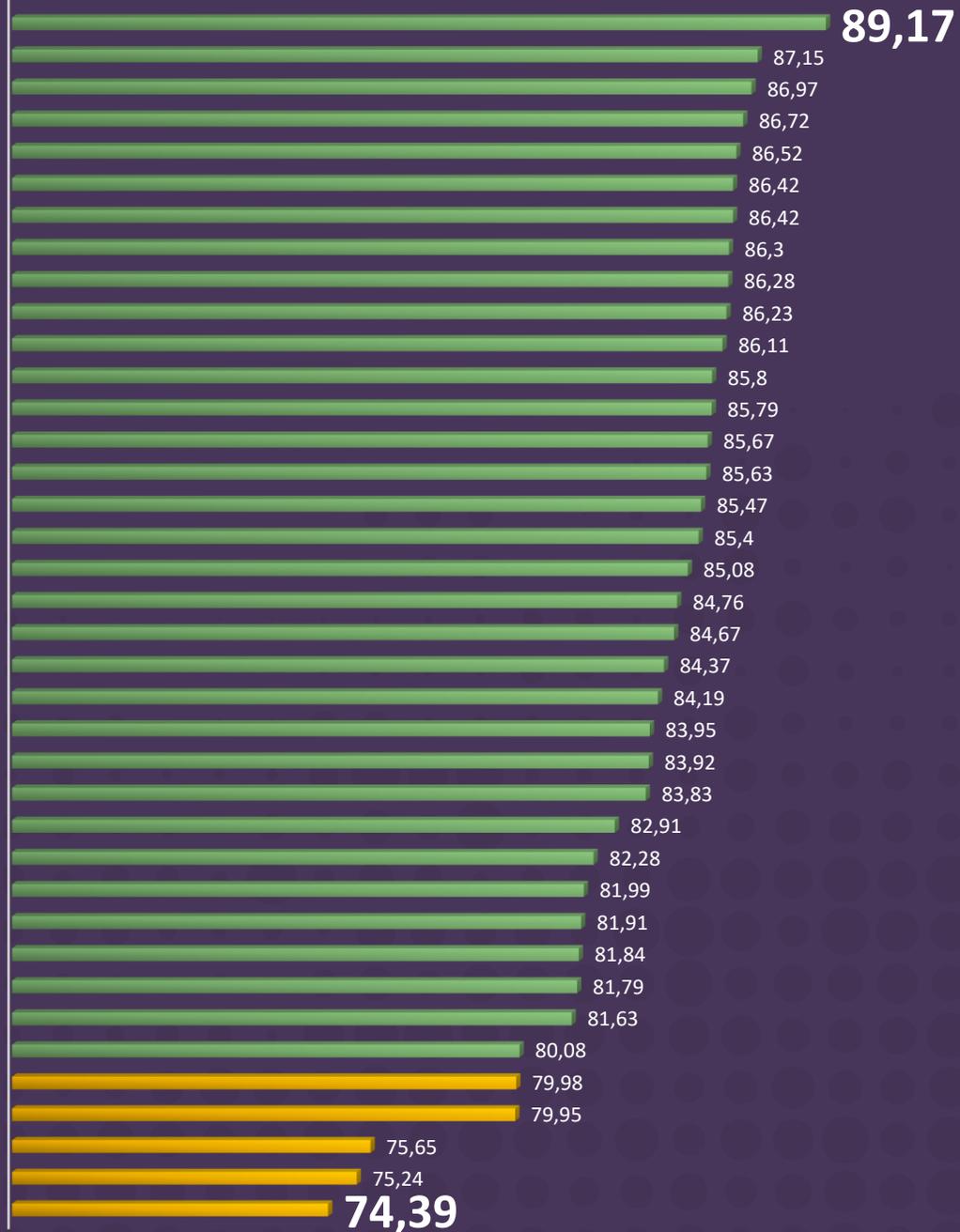
Dinas Koperasi dan  
Usaha Kecil Menengah



Dinas Pariwisata

Eselon II

# KPPD Di Kota Yogyakarta



Eselon III



Balai Pendidikan Menengah Kab. Sleman